

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU BANJARBARU

**Achmad Ramadhani<sup>1</sup>, A. Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, Dewi Merdayanty<sup>3</sup>**

<sup>1) 2) 3)</sup> FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB ( UNISKA) Banjarmasin

Email: [Spardavlog@gmail.com](mailto:Spardavlog@gmail.com)

## ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui secara rinci bagaimana Implementasikan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru serta untuk mengetahui faktor Pendukung Implementasi Kebijakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kepada orang informan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tidak efektif. Namun kendala sarana dan prasarana cukup memadai, dan strategi implementasinya masih memerlukan pengembangan.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, pelayanan

---

## *Abstract*

*Background and Research Objectives is to find out in detail how to Implement the One Stop Integrated Service Policy in the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Banjarbaru City and to know the factors that support the implementation of policies in the Office of Investment and One-Stop Integrated Services Banjarbaru City. The research method uses a descriptive approach, with the type of qualitative research. Data collected by means of observation, interviews, and documentation. To informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results show that the implementation of policies at the Banjarbaru City One Stop Integrated Service and Investment Service is quite effective. However, there are inhibiting factors in the facilities and infrastructure and the policy its implementation still needs improvement.*

**Keywords:** *implementation, policy, service*

## REFERENSI

- Erwin Zubair Gobel, Yosef P. Koton. *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik.*(Yogyakarta. CV Budi Utama.2017) Hal. 10
- Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Perwali Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu.
- PONTOH, G. M., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). *Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banjarbaru*. *Jurnal administrasi publik*, 7(103).
- Rusnadiyah, R., Sumadinata, W. S., & Sari, D. S. (2021). *implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpstsp) kabupaten bandung tahun 2020*. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitiann Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-123.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran* George Edwards III. Jakarta: Lukman Offset
- Thoha, Miftah, 1991, *Perspektif Perilaku Birokrasi Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jilid II, Rajawali Pers, Jakarta
- UUD Nri Tahun 1945 Pasal 22c dan 22d Serta UU N0. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, & Dewan Perwakilan Rakyat Hal.1
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada